

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM YANG NYATA KEPADA KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS *ONLINE***

¹Talla Audra Frayudie, ²Sunasi

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: sunasi486@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya angka kekerasan seksual berbasis *online* (KGBO) saat ini belum dibarengi dengan perlindungan hukum kepada korban. Saat ini kebijakan criminal di Indonesia masih lambat merespons karena tingginya agenda politik dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal RUU PKS dapat dilihat sebagai politik hukum criminal atau kebijakan criminal yang dapat dikatakan sebagai jalan keluar dan sebuah langkah substansial untuk menghukum pelaku KGBO dan memberikan upaya preventif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melihat sejauh mana persoalan KGBO ini berpotensi menurun jika RUU PKS disahkan sebagai payung hukum pidana yang sesuai dengan tujuan pembedaan.

ABSTRACT

The increasing number of online-based sexual violence (KGBO) is currently not accompanied by legal protection for victims. Currently, criminal policy in Indonesia is still slow to respond due to the high political agenda in the ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). Whereas the PKS Bill can be seen as a political criminal law or criminal policy that can be said as a way out and a substantial step to punish the perpetrators of the KGBO and provide preventive measures as well as provide legal protection for victims. This paper uses a normative juridical approach to see to what extent this KGBO issue has the potential to decrease if the PKS Bill is passed as an umbrella for criminal law in accordance with the purpose of punishment.

Keywords: *Online Based Sexual Violence, Elimination of Sexual Violence Bill, Criminal Policy, Purpose of Sentencing.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Meluasnya jangkauan internet, berubahnya pola hidup masyarakat secara masif, perubahan teknologi yang sangat cepat dan canggih, persebaran dan distribusi informasi yang hampir mustahil dibendung, dan penggunaan media sosial yang semakin populer menyebabkan lahirnya bentuk baru kekerasan gender. Temuan ini oleh para akademisi disepakati diberikan nama Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) atau *Online Sexual Abused* dalam bahasa Inggris.¹¹²

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membuat Catatan Tahunan 2020 (Catahu 2020) yang menggambarkan data kenaikan KGBO selama masa pandemik Covid-19 dimana di ranah KDRT/RP bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi kenaikan 920% KBGS di ranah KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya.¹¹³ Peningkatan kekerasan berbasis siber ini perlu dilihat sebagai pola baru yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban dan belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber. Jenis kekerasan seksual lainnya adalah 309 kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus incest dan 57 kasus marital rape.¹¹⁴

Pembahasan KGBO sangat dekat dengan diskursus-diskursus hukum siber. Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan penggunaan dan lalu lintas siber sulit diatur. Kondisi tanpa batasan ini menawarkan kondisi unik namun disisi lain juga memiliki sisi kelam yang inheren. Ketiadaan pengawasan dan batasan yang kabur menjadikan banyak oknum pengguna menggunakan profil anonim atau mencuri identitas orang lain untuk melakukan tindakan ilegal (di dunia nyata). Dari sekian banyak tindakan ilegal yang bersarang pada dunia siber, salah satu yang paling meresahkan dan diskriminatif secara etis adalah kekerasan seksual. Masih menurut Catahu 2020 Komnas Perempuan, KGBO biasanya dilakukan sebagai alat kontrol bagi pacar atau mantan pacar untuk mengontrol apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh korban, mengancam, mengintimidasi, dan memermalukan. Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar (KMP) misalnya paling mendominasi KGBO. Naiknya data KMP ini Kenaikan KMP ini juga seiring dengan

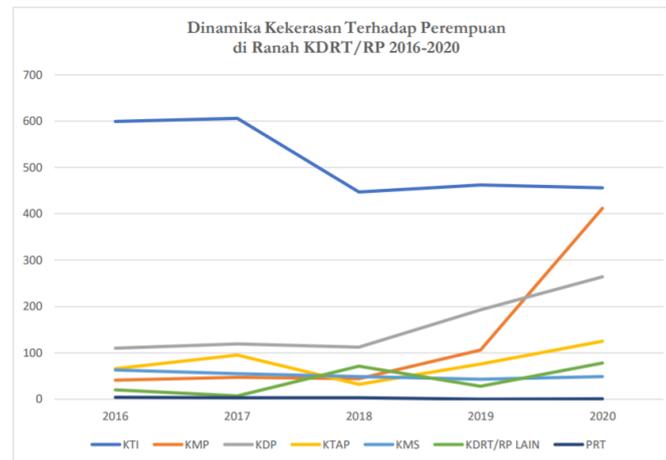
¹¹² Linda S. Jonsson, dkk, "Online sexual abuse of adolescents by a perpetrator met online: a cross-sectional study", *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*, 2019, 13:32, hlm. 1.

¹¹³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2020, hlm. 16,
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

¹¹⁴ *ibid.*

kampanye KBGS dan Toxic Relationship yang membangun pengetahuan dan kesadaran bahwa KBGS dan Toxic Relationship adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹¹⁵

Berikut ini merupakan grafik KMP yang disumbang banyak oleh KBGO berdasarkan pendataan Komnas Perempuan:¹¹⁶



Grafik 53: Dinamika Jenis Kekerasan Ranah KDRT/RP 2016-2020

Namun yang menjadi permasalahan yang belum berhasil negara tangani adalah jawaban atas pertanyaan: apakah permasalahan KGBO dapat diselesaikan hanya dengan meleak teknologi dan kekerasan seksual oleh perempuan? Atau dengan kata lain, bagaimana seharusnya kedudukan negara untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban KGBO? Selanjutnya untuk dapat mengidentifikasi KGBO sebelum masuk terlalu jauh pada tatanan hukum, perlu terlebih dahulu didudukkan jenis KGBO untuk memudahkan pemahaman dan analisis pidana yang akan dilakukan pada bab selanjutnya. . Beberapa tipe kekerasan gender berbasis online yang kerap dilakukan berupa: *revenge porn*; *malicious distribution*; *cyber harassment*; *impersonate*; *cyber stalking*; *cyber recruitment*; *sexting*; *cyber hacking*; *morphing*, *unidentified*.¹¹⁷ Selain daripada itu, melihat melonjaknya angka kekerasan seksual di dunia maya. Peremintah perlu secara serius merumuskan kebijakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan setidaknya terdapat dua permasalahan yang perlu dijawab dalam tulisan ini, yakni:

¹¹⁵ *ibid*, hlm. 54

¹¹⁶ *ibid*.

¹¹⁷ <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>

1. Bagaimana kondisi perlindungan hukum bagi korban kekerasan gender berbasis *online*?
2. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang harus negara ambil untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KGBO?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menelusur data terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya.¹¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan sumber data sekunder, dengan metode penalaran hukum deduktif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yakni sumber data primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dan juga penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari Putusan Mahkamah Agung No. 46 PK/Pid.Sus/2010 (kasus Rodrigo Gularte) dan Putusan No. 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 (kasus Khotibul Umam) yang saya ambil sebagai contoh kasus untuk pembahasan pada penelitian ini, Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN Tng (kasus Wendra Purnama) yang pertimbangan hakimnya akan saya gunakan sebagai contoh untuk dibandingkan dengan kedua kasus di atas, dan sumber-sumber lainnya seperti buku-buku, artikel-artikel maupun berita elektronik.

¹¹⁸ A. Sakti Ramdhon Syah R. 2020. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta Pem bentukannya*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 199.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban KGBO Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi pelindung perempuan yang mengalami KGBO. Misalnya ketentuan mengenai pemulihan, pendampingan, pembinaan, pemulihan kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 16. Namun ketentuan ini khusus mengatur jika korban adalah anak-anak. Padahal yang menjadi korban KGBO tidak selalu anak perempuan namun juga perempuan dewasa.¹¹⁹ Kemudian ketentuan lain yang memberikan perlindungan kepada korban KGBO adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dimana Pasal 48 mengatur mengenai hak untuk memperoleh restitusi. Ketentuan tersebut berbunyi:¹²⁰

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d. dan/ atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹¹⁹ Komnas Perempuan, *Loc. Cit.*

¹²⁰ Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Selain restitusi, UU TPPO juga mengenal pemberian Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 51 UU TPPO:¹²¹

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Namun penulis masih memiliki kritik atas ketentuan dalam perlindungan hukum pada UU TPPO ini. Sebab sebagaimana telah disampaikan pada bagian pendahuluan bahwa banyak korban KBGO yang motif pelaku bukan didasarkan atas motif kekayaan atau perdagangan. Ini mengapa banyak korban KBGO yang datang dari kondisi hubungan yang tidak sehat. Misalnya KDRT atau KPM sebagaimana dibahas pada pendahuluan. Oleh karenanya masih terdapat celah yang kosong mengenai perlindungan hukum bagi korban KBGO dalam ketentuan ini.

Selanjutnya penulis meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bahkan sama sekali tidak mengatur mengenai ketentuan pidana pelaku KBGO atau pemberian perlindungan kepada korban KBGO. Hal ini disebabkan karena revisi Pasal 27 UU ITE pada tahun 2016 lalu tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang melanggar aspek kesusilaan.¹²² Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur mengenai “setiap

¹²¹ *Ibid*, Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

¹²² Tatang Guritno, "ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban->

orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹²³ Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai distribusi dan transmisi konten kesusilaan, yang mana hal ini berdampak pada korban KGBO.¹²⁴

Padahal idealnya sebagai satu-satunya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai domain digital, UU ITE harus mampu memberikan pidana kepada pelaku sekaligus perlindungan hukum yang substantif terhadap korban KGBO. Lebih lanjut hal ini dikarenakan penegakan hukum untuk korban KGBO dalam UU Pornografi dan UU TPPO tidak mampu menjawab tuntutan perkembangan kejahatan di dunia siber. Peraturan yang ada saat ini belum bisa menjerat pelaku KGBO. Sebab ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya berperspektif gender, baik dalam UU ITE maupun KUHAP.¹²⁵ Data Komnas Perempuan berbicara bahwa penegakan hukum misalnya dalam UU Pornografi atau UU TPPO justru berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban yang menjadi objek pornografi. Hal ini secara nyata menambah kerumitan dan kesulitan penanganan kasus-kasus KBGO.¹²⁶

Pengambilan Kebijakan Kriminal yang Tepat Untuk Melindungi Korban Kekerasan Gender Berbasis Online

Teori Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Pidana

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau dikenal secara *interchangable* dengan politik kriminal merupakan usaha rasional dan diakomodiasi secara organisatoir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹²⁷ Dengan bahasa lain Marc Ancel merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the conrol of crime by society*”.¹²⁸ Secara politis, sebenarnya kebijakan kriminal dibentuk atas reaksi komunal masyarakat terhadap kejahatan.¹²⁹

kekerasan-berbasis-gender?page=all

¹²³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹²⁴ *ibid.*

¹²⁵ Khusnaeny, Asmaul, and Dkk. Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, sebagaimana dikutip Jihan Risyah Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61

¹²⁶ Komnas Perempuan, *Op. Cit*, hlm. 50

¹²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 2

¹²⁹ Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit:

Secara umum, Politik kriminal yang mendasari kebijakan kriminal dibentuk karena adanya kesadaran kolektif masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari kejahatan (*social defence*) dan berakhir mencapai satu titik kesejahteraan tertentu (*social welfare*). Oleh karenanya tak mengherankan jika banyak yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.¹³⁰ Pengintegrasian ini oleh Barda Nawawi Arief dieksplorasi mejadi pandangan bahwa dalam penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui sarana penal dan sarana non-penal. Dalam sarana non-penal pengintegrasian masyarakat sebagai *civil society* menjadi penting dalam pengembangan *extra legal system* yang erat kaitannya dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dimana tujuan hukum pidana pada akhirnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.¹³¹

Untuk mengintegrasikan kebijakan pidana dalam kebijakan sosial, maka setidaknya Barda Nawawi Arief menyatakan perlu dilakukannya kriteria umum perbuatan yang memang dinyatakan sebagai gangguan sosial dan dapat dijatuhi pidana, kriteria tersebut diantaranya:¹³²

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Rasionalisasi dalam kebijakan kriminal ini merupakan bentuk amplifikasi dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga perkembangan kebijakan pidana akan selalu

Kluwer-Deventer, Holland, 1969, h. 57.

¹³⁰ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17.

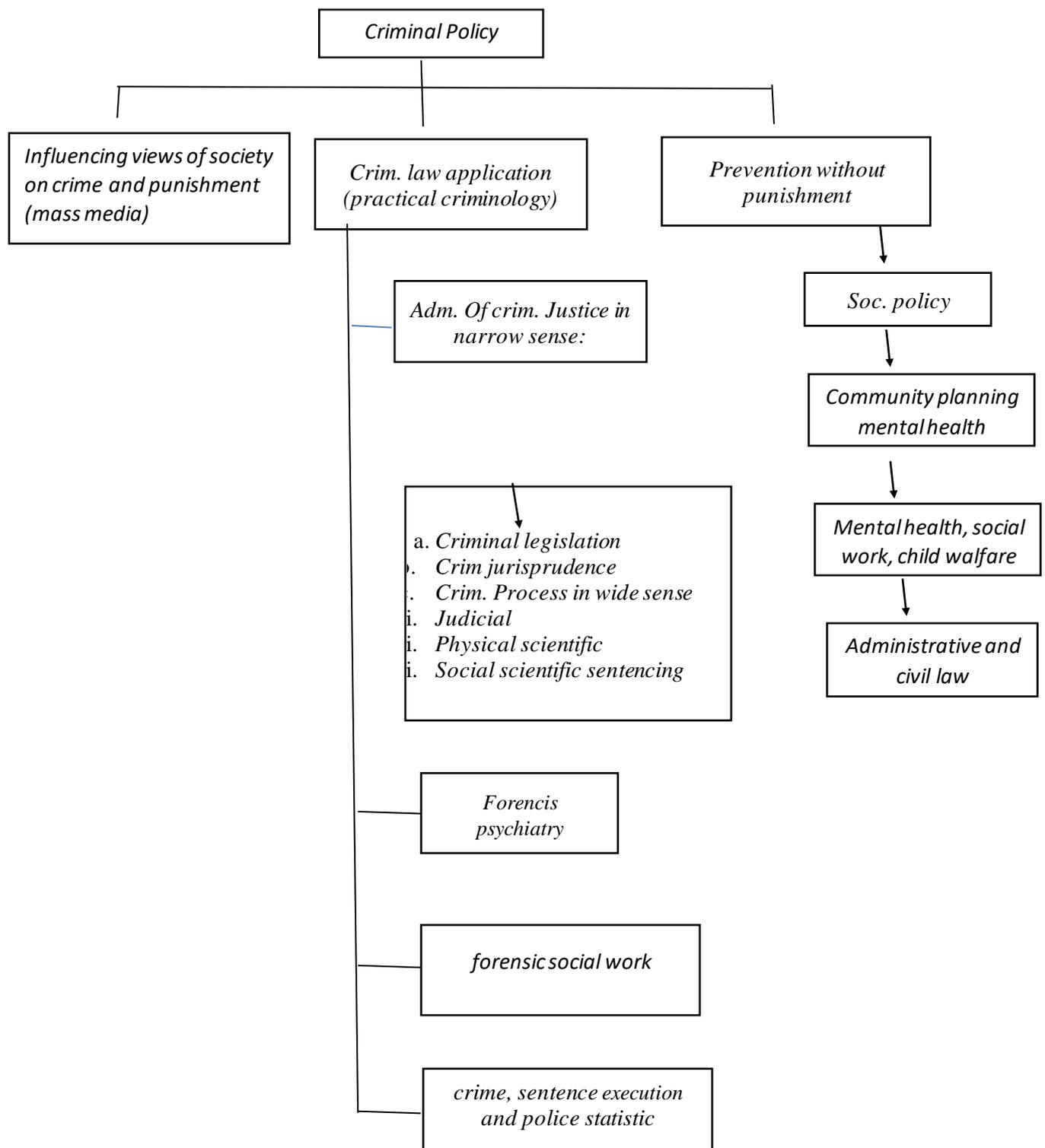
¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

¹³² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan ,,,,,,Op.Cit*, h. 31.

beriringan dengan perkembangan kebijakan sosial. Singkatnya, kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial berangkat dari rasionalisasi masyarakat atas suatu perbuatan yang disepakati sebagai mengganggu ketentraman masyarakat.

Sehingga tujuan kebijakan sosial yakni untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat sejalan dengan kebijakan kriminal yang bertujuan untuk memberikan reaksi atas aksi yang merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Dalam bukunya *The Other Side of Criminology*, Hoefnagels memberikan gambaran ruang lingkup kebijakan kriminal yang cukup luas jangkauannya dan digambarkan dalam skema berikut ini termasuk contoh yang ada pada masing-masing ruang lingkup:¹³³

¹³³ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, English Translation by Jan G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hal. 56.



Dari pendapat Hoefnagels tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui *criminal law application*; dan
2. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) melalui *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment*

Tujuan Penjatuhkan Pidana Kepada Pelaku dalam Teori Pidana

a. Tujuan teori retributive

Tujuan teori retributif adalah menjadikan pidana sebagai pembalasan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹³⁴ Teori ini bertujuan melakukan pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹³⁵

b. Teori deterrence

Tujuan teori ini adalah melakukan pencegahan. Dalam deterrence genenal tujuan pidana adalah membuat masyarakat dapat mempertimbangkan rasionalitas atas kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir. Kemudian dalam deterrence khusus bertujuan agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeratan dan penangkalan sekaligus. Penjeratan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

¹³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 10-11

¹³⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

c. Teori *treatment*

Teori ini befokus pada re-sosialisasi pelaku kejahatan. Dikenal pula sebagai teori rehabilitatif. Tujuan teori ini adalah memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku kejahatan agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat. Penjahat juga lah seorang manusia, oleh karenanya seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹³⁶

d. Teori social defence

Tujuan utama dari teori ini adalah menintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap pembuatnya. Hukum perlindungan sosial masyarakat penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang pembuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹³⁷

e. Teori restorative justice

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.¹³⁸ Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.¹³⁹

¹³⁶ Muladi dan Banda Nawawi, Op,cit,Hlm 12

¹³⁷ *ibid*

¹³⁸ Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

¹³⁹ *Ibid*.

Reformasi Hukum Pidana Materil dan Formil

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perempuan di dunia siber, mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan perlindungan yang substansial, penulis menilai hal yang saat ini paling krusial dilakukan adalah melakukan reformasi terhadap hukum pidana materil dan formil di Indonesia. Sebagai karakteristik yang unik dan baru, KGBO ini harus dilihat melalui kacamata hukum pidana yang progresif. Maksudnya hukum sebenarnya harus berbicara untuk keadilan.

Kondisi yang saat ini sering terjadi yakni manakala pencari keadilan justru harus menempuh prosedur-prosedur hukum yang tidak adil. Ini kemudian menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan perlindungan hukum. Pada kondisi ini hukum dipandang gagal memberikan upaya untuk mencapai keadilan. Supremasi hukum dalam negara hukum kemudian dipertanyakan eksistensinya.

Salah satu penyebab yang muncul dalam dunia hukum adalah masih terbingkai dalam satu-satunya paradigma positivisme yang tidak lagi berfungsi sebagai analisis dan kontrol yang berjalan dengan tabel kehidupan karakteristik manusia dalam realitas dalam konteks yang dinamis dan multi kepentingan. Keduanya dalam proses. Dengan demikian, hukum hanya dipahami dalam arti yang sangat ketat, yaitu hanya diartikan literlek sebagaimana yang tertera dalam peraturan, atau bahkan malas untuk menggali pemaknaan keadilan hukum yang sesungguhnya, sedangkan nilai-nilai di luar hukum tidak diartikan sebagai hukum. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan ini. Hanya saja perlu diakui bahwa hukum progresif membutuhkan keberanian aparat penegak dan legislator untuk merumuskan dan mengartikulasikan keadilan ke dalam produk hukum dan tindakan hukum. Ini sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo yang menyatakan, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan melihat inti dan esensi dari hukum sebagai sebuah upaya mencapai keadilan (*to very meaning*) dari undang-undang. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁴⁰

Oleh karenanya untuk dapat mengartikulasikan ketidakadilan yang dirasakan perempuan korban KGBO maka terlebih dahulu hukum pidana materil maupun formil harus dapat mampu mengartikulasikan kondisi asimetri yang ada dalam hubungan subordinatif

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

bertingkat antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat menciptakan tatanan hukum yang progresif maka seniscayanya kerangka patriarki sebagai sistem simbolik irasional yang melahirkan praktik sistemik yang mendevaluasi dan mereproduksi ketidakseimbangan perempuan dan laki-laki harus terlebih dahulu dihancurkan.¹⁴¹

Oleh karenanya perbaikan melalui hukum pidana yang baik dan progresif secara esensial memiliki hakikat dan tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sebab hukum pidana di Indonesia dilihat melalui kacamata politik hukum merupakan medium untuk menanggulangi kejahatan (tujuan pemidanaan preventif).¹⁴² Dalam teori pidana hal ini dikenal dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*, yakni dimana hukum pidana yang berlaku secara positif (*ius poenale*) dan kemudian hak negara memidana yang berkaitan dengan ancaman pidana pada perbuatan tertentu (*ius puniendi*).¹⁴³

Rommelink menekankan bahwa implementasi *ius poenale* sangat bergantung pada bagaimana peradilan beroperasi yang diatur dalam hukum pidana formil.¹⁴⁴ Perbaikan ini banyak pihak menilai dapat dimulai dengan mengundang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU ini dinilai sebagai *lex specialis* dari KUHP karena mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang bertalian dengan kekerasan seksualitas yang tidak diatur dalam KUHP.¹⁴⁵ Adapun kaitannya dengan KGBO dalam KUHP mengatur ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Penjelasannya KBGO dapat dimasukkan dalam bentuk tindakan nonfisik. Dengan demikian karena RKUHP mengat¹⁴⁶ur mengenai KGBO secara materil dan formil karena adanya penegakan hukum danendorongan negara untuk berperan dalam upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.¹⁴⁷

¹⁴¹Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61

¹⁴² 68

¹⁴³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 3

¹⁴⁴ *ibid.*

¹⁴⁵ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, hlm. 81-89.

¹⁴⁶ Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Penghapusan K (Placeholder1) (Placeholder2) (Placeholder1)ekerasa Seksual.

¹⁴⁷ Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hlm 5-6.

PENUTUP

Tulisan ini berkesimpulan bahwa KGBO yang merupakan bentuk baru dari kekerasan seksual karena adanya perkembangan teknologi sebagai barang yang tidak nampak jelas, bukan berarti perlindungan korban dan penghukuman pelakunya tidak perlu dilakukan. Terlebih peraturan perundang-undangan saat ini belum ada yang cukup secara progresif menjawab kebutuhan perempuan untuk merasa aman di ruang siber. Pidana sebagai hukum yang mampu memberikan daya dorong sekaligus ancaman untuk memperingati pelaku harus dapat mengambil peran dalam pelik KGBO ini.

Kekerasan seksual dalam ranah siber banyak menyorot perhatian, namun aparat penegak hukum kerap menolak memproses pelaku karena dianggap tidak terdapat hukumnya. Ini yang merupakan kekurangan fatal baik dalam UU Pornografi, UU TPPO, hingga UU ITE yang idealnya mengatur norma formal dalam dunia siber.

Oleh karenanya RUU PKS dapat dilihat sebagai politik hukum criminal atau kebijakan criminal yang dapat dikatakan sebagai jalan keluar dan sebuah langkah substansial untuk menghukum pelaku KGBO dan memberikan upaya preventif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban. Ini menjadi konsekuensi logis sebab RUU PKS menggunakan pendekatan berbasis gender dalam proses penyusunannya.

RUU PKS diharapkan dapat memberikan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dimana hal ini berkesesuaian dengan keadilan dalam hukum pidana yakni tujuan pembedanaan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sakti Ramdhon Syah R. 2020. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta Pem bentukannya*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Khusnaeny, Asmaul, dan dkk. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, diterjemahkan oleh Jan G.M. Hulsman, Deventer: 1973.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.

Jurnal

- Jonsson, Linda S. dkk, "Online sexual abuse of adolescents by a perpetrator met online: a cross-sectional study", *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*, 2019.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix

Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.

John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya

Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.

Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019.

Publikasi Penelitian

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2020, hlm. 16,
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Internet

Nenden San, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”
<https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>

Tatang Guritno, "ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender”,
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>

Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017,
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>.